



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Jl. Pahlmura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 ☎ (021) 727 96157

No : UM 01 11 – Cb.PKP/762
Lampiran : 2 berkas

Jakarta, 12 Juni 2009

Kepada Yth;

(Daftar Terlampir)

Perihal : Penetapan Daftar Panjang (*Long List*) Calon Lokasi Kelurahan potensial yang memenuhi syarat untuk mengikuti Proses Seleksi Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kelurahan Penerima PLPBK, Tahun 2009.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)/ *Neighbourhood Development (ND)* merupakan bagian dari pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1999 hingga tahun 2009 dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif yang di tuju pada BKM yang berdaya menuju mandiri.
2. Telah disepakatinya pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas sebagai pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, Tahap Ke-2 pada periode Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan pada 188 Kelurahan di 19 wilayah Provinsi.
3. Surat Keputusan Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Nomor:07/KPTS/DC/2009 tanggal 22 April 2009, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Nasional dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Tahap Ke-2 Periode Tahun Anggaran 2009 dan Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Nomor: PR.0501-cb/352 tanggal 21 April 2009, Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas, Tim Seleksi Nasional dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas telah menetapkan Daftar Urutan Panjang (***Long List***) Calon Lokasi Kelurahan/BKM Potensial Penerima Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) (**daftar terlampir**).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon agar bapak/Ibu dapat segera melakukan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Tim Konsultan pendamping (Korkot) dan Tim Seleksi Provinsi untuk segera melaksanakan proses seleksi selanjutnya, sesuai dengan Ketentuan dalam Dokumen Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Untuk selanjutnya, tahapan proses seleksi di tingkat Provinsi (*Short List*) diharapkan dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2009** dan **semua data yang menyangkut SIM telah ter-update secara online**. Laporan lengkap hasil Proses Seleksi di Tingkat Provinsi dikirimkan langsung (Via Pos dan *Email*) ditujukan kepada :

Tim Seleksi Nasional dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Tahap Ke-2, Tahun 2009.

UP:

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)-Advanced

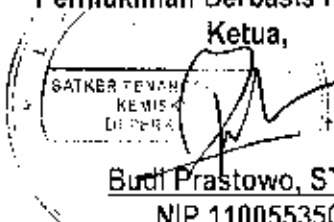
Jl. Penjernihan II/10 Pejompongan Jakarta Pusat 10210

E-mail: kmpadvanced@indosat.net.id cc: yd2nwb@yahoo.com

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Tim Seleksi Nasional dan Penetapan Lokasi
Kegiatan Pengembangan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas**

Ketua,



Budi Prastowo, ST.MT

NIP.110055350

Tembusan :

1. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (sebagai laporan)
2. Ka PMU P2KP Pusat
3. Ka SNVT P2KP Pusat
4. Ka SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi
5. Satker/PPK P2KP Kab/kota
6. Team Leader Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Reguler
7. Team Leader Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Advance
8. Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) PNPM P2KP

Lampiran 1

Surat no: UM 01 11 - Cb.PKP/762

Kepada Yth:

Tim Seleksi Provinsi
Up. Satker PBL Provinsi

1. Provinsi NAD
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Bangka Belitung
5. Provinsi Lampung
6. Provinsi Banten
7. Provinsi Jawa Barat
8. Provinsi Jawa Tengah
9. Provinsi DIY
10. Provinsi Jawa Timur
11. Provinsi Kalimantan Selatan
12. Provinsi Kalimantan Timur
13. Provinsi Sulawesi Selatan
14. Provinsi Sulawesi Utara
15. Provinsi Sulawesi Tengah
16. Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Provinsi Sulawesi Barat
18. Provinsi Gorontalo
19. Provinsi NTB